

Judul : Banyak dokumen penting hilang: korban banjir Sumatera bisa urus secara gratis
Tanggal : Rabu, 03 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Banyak Dokumen Penting Hilang

Korban Banjir Sumatera Bisa Urus Secara Gratis

Senayan meminta Pemerintah untuk menggratiskan layanan penerbitan kembali dokumen-dokumen penting bagi para korban yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera.

KETUA Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, bantuan untuk korban bencana tidak boleh berhenti hanya pada penyaluran logistik seperti makanan, tenda darurat, dan obat-obatan. Tapi juga mencakup kebutuhan bantuan administratif. Utamanya, penerbitan kembali dokumen kependudukan dan kenegaraan yang rusak atau hilang akibat bencana.

"Kami mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berkomitmen dalam menerbitkan kembali dokumen keimigrasian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Dengan bebas persyaratan dokumen dan pungutan biaya," ujar Willy dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Willy bilang, bencana banjir bandang di sebagian wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh telah menyebabkan banyak warga kehilangan dokumen penting. Seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), paspor, hingga dokumen legal lain. Hilangnya dokumen itu berpotensi menghambat proses bantuan, akses kesehatan, mobilitas, hingga penyaluran dana pemulihan.

Menurut Willy, kemudahan administratif, seperti penerbitan kembali dokumen yang hilang akibat banjir, adalah bentuk bantuan yang meringankan beban masyarakat. Ini menjadi komitmen lembaganya untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana alam.

"Situasinya darurat. Jangan bebankan mereka dengan prosedur panjang dan pungutan biaya. Negara harus hadir tanpa syarat," tegas politikus kelahiran Solok, Sumatera Barat itu.

Untuk mewujudkan pembebasan biaya tersebut, Willy mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berkoordinasi dengan Kementerian



Willy Aditya

Keuangan (Kemenkeu). Sebab pembiayaan penerbitan dokumen imigrasi berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "DPR akan mengawal kebijakan ini hingga diterapkan di lapangan," tegas anggota Fraksi Nasdem ini.

Senada, anggota Komisi II DPR Cindy Monica meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempermudah proses pengurusan dokumen warga terdampak musibah banjir di Sumatera. Mulai dari dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya.

"Kemendagri agar memberikan layanan khusus tanpa biaya agar masyarakat bisa segera mengurus dokumen mereka," saran Cindy dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Cindy mengungkapkan banyak warga kehilangan seluruh dokumennya akibat bencana tersebut. Dalam kondisi bencana seperti ini, pengurusan ulang seharusnya dipermudah dan dipercepat.

"Semoga pemulihan bagi para korban dapat berjalan lebih cepat dengan adanya dukungan langsung dari Pemerintah Pusat (Pempus) dan DPR," harap anggota Fraksi Nasdem ini.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus kepada warga terdampak banjir di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

"Kalau perlu kita ganti. Nanti akan dilihat apakah dokumen keimigrasian yang rusak karena terbawa air dan sebagainya," ujar Agus dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Menurut Agus, banyak warga kehilangan dokumen penting,

termasuk paspor, sehingga diperlukan proses pemulihan administratif yang cepat dan tepat. Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Jika dokumen rusak akibat bencana, kami akan mempertimbangkan pemberian dispensasi atau penggantian dokumen," ucapnya.

Dia menegaskan, pelayanan utama Imipas tetap menjadi prioritas, tapi kebijakan khusus dapat diterapkan di daerah terdampak agar masyarakat tidak terbebani secara administratif. "Kami memastikan warga tetap dapat dilayani tanpa menimbulkan kesalahan administratif. *Insha Allah* akan ada dispensasi sesuai ketentuan," tandas Agus.

Kebijakan dispensasi ini, lanjutnya, akan memudahkan masyarakat memulihkan dokumen mereka sehingga urusan perjalanan maupun administratif kependudukan dapat kembali berjalan lancar. "Kami mengimbau warga terdampak segera melaporkan kerusakan atau kehilangan dokumen agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi," imbau mantan Wakapolri ini. ■ TIF